

**RINGKASAN PENELITIAN**

J u d u l : SIKAP DAN ASPIRASI POLITIK PEGAWAI NEGERI

Peneliti : Sutrisno  
Muhammad Asfar  
Joose Ch. Tatipata  
Yusuf Ernawan  
Siti Aminah

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Sumber Biaya : DIP. Operasional Perawatan dan Fasilitas  
Universitas Airlangga tahun 1992/1993.  
SK. Rektor No. 5186/PT.03.H/N/1992.  
Tanggal 6 Juli 1992.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh posisi dilematis pegawai negeri dalam menentukan sikap politiknya, terutama dalam menentukan afiliasi politik dan menyalurkan aspirasi politiknya. Satu sisi sikap dan perilaku pegawai negeri sebagai individu warga negara seharusnya mempunyai kebebasan menentukan sikap dan perilaku politiknya, sehingga mereka mempunyai otonomi dalam menentukan sikap dan perilaku politiknya itu. Namun disisi lain, sebagai anggota KORPRI, pegawai negeri mempunyai "keharusan" untuk menyalurkan aspirasi politiknya melalui organisasi politik Golkar yang nota bene partai pemerintah. Sehingga sikap dan perilaku politiknya juga tidak bisa menyimpang begitu saja dari bingkai-bingkai sikap dan perilaku politik organisasi induknya. Dalam konteks semacam ini pertanyaan-pertanyaan sederhana kemudian muncul, seperti apakah pegawai negeri itu mempunyai kebebasan (otonomi) untuk menentukan sikap dan perilaku politiknya, atau sikap dan perilaku politik mereka sesungguhnya telah digariskan oleh organisasi induknya (Golkar). Sehingga mereka cenderung tidak mempunyai kebebasan dalam menentukan pilihan.

Dengan semakin meningkatnya perkembangan modernisasi dan tuntutan demokratisasi, keharusan pegawai negeri untuk berafiliasi dan menyalurkan aspirasi politiknya melalui Golkar itu mulai dipersoalkan, termasuk dikalangan pegawai negeri itu sendiri. Untuk itu penelitian ini mengajukan satu permasalahan pokok yakni : bagaimanakah sikap dan

aspirasi politik pegawai negeri, terutama sikap dan aspirasi politik mereka terhadap isu-isu utama yang muncul akhir-akhir ini.

Dengan mengambil lokasi di kota Surabaya peneliti mewawancarai 300 orang pegawai negeri dari berbagai lingkungan departemen pemerintah dan berbagai strata kepangkatan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa sebagian besar responden menghendaki pegawai negeri diberi kebebasan dalam memilih partai politik. Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa sebenarnya pegawai negeri selama ini merasa tertekan dengan keharusan pemerintah untuk menyalurkan aspirasi politiknya melalui Golkar. Kehendak ini juga konsisten dengan sikap mereka dalam mensosialisasi politik kepada anak-anaknya yang sebagian besar mengaku memberi kebebasan untuk menentukan afiliasi politiknya.

Yang menarik dari hasil penelitian ini adalah bahwa sebagian besar responden mengaku tidak ingin aktif dan terlibat dalam kegiatan politik. Agaknya trauma historis pada masa lalu, jaman Orde Lama begitu melekat pada mereka. Pada masa itu, pegawai negeri terkotak-kotak dalam berbagai partai politik dan berkonflik satu sama lain, akibat keterlibatan mereka pada dunia politik. Bahkan bentrokan fisikpun akhirnya tidak bisa terhindarkan.

Alasan mereka tidak ingin aktif dalam kegiatan politik cukup beragam, mulai dari tidak tahu soal politik, tidak punya waktu, tidak tertarik persoalan politik, bahkan ada yang beralasan karena takut melakukan kegiatan politik.

Meskipun posisi mereka sebagai pegawai pemerintah, tetapi relatif kritis dalam menilai fungsi lembaga-lembaga pemerintah. Sebagaimana responden menilai misalnya aktivitas DPR belum menunjukkan kemampuannya sebagai lembaga penyalur aspirasi rakyat, terutama ketidakmampuan DPR dalam mengontrol pemerintah dan membuat Rancangan Undang-undang. Tragisnya mereka menilai bahwa ketidakmampuan DPR itu diakibatkan oleh besar dan kuatnya posisi dan pengaruh eksekutif dalam lembaga legislatif, yang nota bene adalah kelompok mereka sendiri. Untuk itu solusi yang mereka ajukan adalah mengurangi keterlibatan birokrasi dalam kehidupan politik praktis termasuk dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Dengan begitu mereka berharap birokrasi Indonesia bisa bersikap "above politics".